



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94111

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id

sp4n@sultengprov.go.id

laportuaka@sultengprov.go.id

ppid@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 067/368/DKIPS

TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025-2029

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025, maka perlu disusun Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan tata cara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah diperlukan pedoman perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah yang terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana telah diperbarui dengan ketentuan evaluasi SPBE yang berlaku pada Tahun 2025.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.2.1/125.1/Bappeda-G.ST/2025 tentang Penetapan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025-2029
- PERTAMA Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, meliputi Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Pohon Kinerja, *Cascading*, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu (IKI), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 meliputi Manual Indikator Kinerja Utama, Aplikasi E-SAKIP SALARIA Sulawesi Tengah, Pengukuran Kinerja (E-19) Berkala tahun 2025-2029;
Pelaporan Kinerja meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- KETIGA Pedoman Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana terlampir;
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Palu, 21 September 2025

**Pt. KEPALA DISKOMINFOSANTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP, M.AP

Pembina Utama Madya
NIP. 19820802 200112 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 067/368/DKIPS
TENTANG DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR
UTAMA, INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN
INDIKATOR KEGIATAN, SUBKEGIATAN
TAHUN 2025-2029

1. Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama

Nama Indikator	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) (PEMERINTAH DIGITAL)
Dasar Hukum	• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Definisi	SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Rumus Perhitungan	Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain : 1. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 2. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE dengan bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 3. Domain Manajemen SPBE : Manajemen SPBE dengan bobot 16,50% yang terdiri dari 11 indikator penilaian, dan 4. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot 45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian. Pada penghitungan Indeks SPBE, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri dengan indikator penilaian yang meningkat setiap tahunnya. Kemudian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penilaian mandiri tersebut (setiap dua tahun sekali) dan mengeluarkan dokumen Berita Acara Hasil Penilaian secara nasional.
Interpretasi	Semakin baik sarana prasarana sumber daya manusia dan infrastruktur TIK maka akan meningkatkan poin Indeks SPBE. Dari meningkatnya poin tersebut secara otomatis maka akan meningkatkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Sulawesi Tengah dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sebagai wujud Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP)
Dasar Hukum	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; • Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029; • Pedoman Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat.
Definisi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah metode atau alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu negara atau lembaga pemerintah mampu memberikan akses terhadap informasi publik kepada masyarakat. Indeks ini dirancang untuk mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas suatu entitas dalam menyediakan informasi publik.
Rumus Perhitungan	Penilaian IKIP tingkat Provinsi dilakukan oleh Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 orang perwakilan Komisioner Komisi Informasi Provinsi, 1 (satu) orang perwakilan Dinas Kominfo dan 2 orang eksternal (unsur Akademisi, Praktisi, atau Masyarakat) terhadap 9 (sembilan) Informan Ahli yang terdiri dari unsur Pemerintah/Badan Publik, Pelaku Usaha/Pengurus Asosiasi Usaha, dan/atau Akademisi/Praktisi/Wakil Masyarakat Sipil yang memiliki kriteria antara lain memiliki pengetahuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan berpengalaman dalam isu Keterbukaan Informasi Publik minimal 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk penilaian IKIP tingkat Nasional dilakukan terhadap 15 (lima belas) orang Informan Ahli yang memiliki unsur dan kriteria yang sama dengan Informan Ahli tingkat daerah. Penilaian IKIP berdasarkan data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara kewajiban untuk menghormati (<i>to respect</i>), melindungi (<i>to protect</i>), dan memenuhi (<i>to fulfil</i>). Pelaksanaan pengumpulan nilai IKIP dilaksanakan melalui kuesioner yang disampaikan tim Pokja Daerah di setiap provinsi ke 1A provinsi yang terdiri dari 9 orang meliputi unsur pemerintah daerah, unsur dunia usaha, unsur akademisi, dan unsur CSO atau LSM di setiap provinsi. Kemudian hasil penilaian kuesioner oleh 9 IA dibahas dalam kegiatan FGD melibatkan Tim IKIP Pusat untuk mendapatkan skor akhir IKIP Provinsi. Range IKIP adalah : - 0 – 30 : Buruk Sekali - 31 – 59 : Buruk - 60 – 79 : Sedang - 80 – 89 : Baik - 90 – 100 : Baik Sekali
Interpretasi	Untuk mendorong nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik maka diwujudkan melalui kolaborasi kerja antar perangkat daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten guna mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh lembaga – lembaga publik yang ada di Sulawesi Tengah.
Sumber Data	Komisi Informasi RI
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (IPIKP)
Dasar Hukum	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; • Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital; • Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital; • Pedoman Pelaksanaan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
Definisi	Indeks Pengelolaan Informasi dan Keamanan Publik (IPIKP) merupakan suatu indikator gabungan (Composite Indicator) yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, meliputi Input, Proses, Output dan Outcome. Indeks PIKP mengukur kinerja dari sisi pengelolaan informasi (dimensi Input dan Proses) serta dampak dari pengelolaan informasi tersebut (dimensi Output dan Outcome) Pengukuran Indeks PIKP menggunakan pendekatan sistem: • Dimensi Input, terdiri dari 4 variabel, yaitu: anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, media dan saluran komunikasi • Dimensi Proses, terdiri dari 4 variabel, yaitu: pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi • Dimensi Output, terdiri dari 3, yaitu: penerimaan informasi, penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik dan penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik • Dimensi Outcome, terdiri dari 3 variabel, yaitu: pemenuhan hak untuk tahu, pemerataan informasi, dan partisipasi publik
Rumus Perhitungan	Perhitungan indeks di dasarkan pada nilai proses dari setiap dimensi. Untuk indikator yang dinilai dengan skala nominal (Ya=1; dan Tidak=0), maka perhitungan indeks di formulasikan sebagai berikut: Indeks= Jumlah yang menjawab “Ya” dibagi jumlah sampel Sementara, untuk item dengan skala ordinal (skala jawaban 1 – 4) maka perhitungan indeks dilakukan dengan cara sebagai berikut: Indeks = Jumlah Skor di bagi (4 x Jumlah Sampel). Contoh: di kuesioner survey Masyarakat, perhitungan untuk pertanyaan nomor 1 terkait informasi Program Prioritas Nasional, dari jumlah 39 indikator, yang di jawab YA ada 9, maka skor nomor pertanyaan 1 adalah 9, demikian cara menghitung skor untuk pertanyaan lainnya yang sejenis. Untuk pertanyaan skala ordinal, misal di kuesioner survey masyarakat, nomor pertanyaan 6i dan 7i, jawaban yang dilingkari menunjukan skor untuk indikator variabel yang bersangkutan. Skor seluruh jawaban di jumlahkan m kemudian di bagi 4x jumlah sampel di daerah tersebut. Demikian seterusnya untuk pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya Capaian skor untuk masing-masing dimensi ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi skor masing-masing variabel dan indikator variabel. Skor tersebut berkisar dari angka 1 – 100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor

	atau nilai total seluruh dimensi dalam indeks PIKP 2024 dibagi menjadi 5 kategori, yaitu: “Sangat Baik” (skor > 80) ; “Baik” (skor > 70 - 80) ; “Sedang” (skor > 60 - 70) ; “Buruk” (skor > 50 - 60), dan “Sangat Buruk” (skor <= 50).
Interpretasi	Semakin Tinggi Skor Menunjukkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien, dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang lancar, penyebaran informasi yang luas dan dampak positif bagi masyarakat.
Sumber Data	Hasil Survey KemenKOMDIGI RI
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	DOMAIN LAYANAN SPBE
Dasar Hukum	• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; • Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
Definisi	Domain SPBE merujuk aspek-aspek yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Domain ini berfokus pada bagaimana layanan tersebut dirancang, diimplementasikan dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Beberapa komponen yang biasanya termasuk dalam Domain Layanan SPBE adalah: • Layanan Administrasi Pemerintahan: Penyediaan layanan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, seperti: pengajuan izin, pendaftaran dan layanan publik lainnya yang dapat diakses secara elektronik. • Integritas Layanan: Upaya untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang disediakan oleh instansi pemerintahan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut secara terpadu dan mudah. • Kualitas Layanan: Penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan, termasuk kecepatan, akurasi dan kepuasan pengguna terhadap layanan yang diterima. • Aksesibilitas: Memastikan bahwa layanan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau akses terhadap teknologi.

	• Inovasi Layanan: Pengembangan dan penerapan inovasi dalam penyediaan layanan, seperti penggunaan aplikasi mobile, portal layanan online dan sistem informasi yang memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. • Pengelolaan Data dan Informasi: Pengelolaan data yang dihasilkan dari layanan yang diberikan, termasuk pengumpulan, penyimpanan dan analisis data untuk meningkatkan kualitas layanan.
Rumus Perhitungan	Penilaian SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh MenpanRB pada Domain 4 – layanan SPBE (Bobot 45,50%)
Interpretasi	Semakin Tinggi bobot Domain 4 menunjukkan bahwa layanan Publik yang disediakan melalui SPBE benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, mudah diakses, berkualitas tinggi, aman dan terintegrasi.
Sumber Data	Hasil Evaluasi SPBE oleh Tim Penilaian KemenPANR
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	DOMAIN MANAJEMEN SPBE
Dasar Hukum	• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; • Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
Definisi	Domain Manajemen SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian sistem SPBE dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Domain ini mencakup berbagai elemen yang di perlukan untuk memastikan bahwa penerapan SPBE berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Beberapa komponen yang biasanya termasuk dalam Domain Manajemen SPBE adalah: • Manajemen Risiko: Identifikasi, analisa, dan mitigasi risiko yang terkait dengan penerapan SPBE . • Manajemen Data: Pengelolaan Data yang di hasilkan dan digunakan dalam sistem SPBE, termasuk aspek keamanan dan privasi data. • Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengelolaan pegawai yang terlibat dalam penerapan SPBE, termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi • Manajemen Perubahan: Proses untuk pengelolaan perubahan yang terjadi dalam organisasi akibat penerapan SPBE. • Manajemen Layanan: Pengelolaan layanan yang diberikan melalui SPBE, termasuk pemantauan dan evaluasi
Rumus Perhitungan	Penilaian SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang di lakukan oleh MenpanRB pada Domain 3 - Manajemen SPBE (Bobot 16,50%)
Interpretasi	Semakin Tinggi bobot Domain 3 - Manajemen SPBE menunjukkan semua aspek pengelolaan sistem ini terintegrasi dengan baik dan mendukung tujuan organisasi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.
Sumber Data	Hasil Evaluasi SPBE oleh Tim Penilaian KemenPANRB
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	DOMAIN TATA KELOLA SPBE
Dasar Hukum	• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; • Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
Definisi	Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merujuk pada kerangka kerja dan struktur yang mengatur bagaimana SPBE dikelola dan diimplementasikan dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Domain ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian penerapan SPBE untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Aspek-aspek yang termasuk dalam Domain Tata Kelola SPBE meliputi: • Kebijakan dan Strategi: Penetapan kebijakan dan strategi yang jelas untuk penerapan SPBE. • Organisasi dan Struktur: Pembentukan tim atau unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan SPBE. • Proses dan Prosedur: Pengembangan proses dan prosedur yang mendukung implementasi SPBE. • Pengawasan dan Audit: Mekanisme untuk melakukan pengawasan dan audit terhadap penerapan SPBE untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas. Domain Tata Kelola SPBE bertujuan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung reformasi birokrasi
Rumus Perhitungan	Penilaian SPBE Pemerntah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang di lakukan oleh MenpanRB pada Domain 2 – Tata Kelola SPBE (Bobot 25%)
Interpretasi	Semakin Tinggi bobot Domain 2 – Tata Kelola SPBE menunjukkan terciptanya sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung reformasi birokrasi.
Sumber Data	Hasil Evaluasi SPBE oleh Tim Penilaian KemenPANRB
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	DOMAIN KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
Dasar Hukum	• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; • Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
Definisi	Berdasarkan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 Domain ini mencakup regulasi internal instansi yang mendukung penerapan SPBE. Beberapa aspek dan indikator utama di dalamnya meliputi: Aspek Tata Kelola SPBE (Misalnya arsitektur SPBE instansi, peta rencana) : • Manajemen Data dan Aset TIK • Pengoperasian • Pusat Data • Jaringan Intra Pemerintah • Sistem Penghubung Layanan • Manajemen Keamanan Informasi dan Audit TIK • Koordinasi atau Tim Pengarah SPBE di tingkat instansi pusat atau daerah Domain Kebijakan merupakan fondasi regulatif penerapan SPBE di seluruh instansi pemerintah yang meliputi kebijakan yang tertulis dan pengaturan internal terkait strategi, teknologi, keamanan, koordinasi, dan audit.
Rumus Perhitungan	Penilaian SPBE Pemerntah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang di lakukan oleh MenpanRB pada Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE (Bobot 13%)
Interpretasi	Semakin Tinggi bobot Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE menunjukkan bahwa kebijakan bukan hanya dibuat, tapi juga diterapkan, dipantau, dan diperbarui secara berkala sesuai hasil evaluasi.
Sumber Data	Hasil Evaluasi SPBE oleh Tim Penilaian KemenPANRB
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	INDEKS KEAMANAN INFORMASI (KAMI)
Dasar Hukum	• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; • Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; • Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital; • Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE; • Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi; • Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025–2029.
Definisi	Definisi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan informasi di sebuah organisasi, terutama dalam lingkup instansi pemerintah. Indeks ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan aspek-aspek keamanan informasi. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan public secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi. Standar SNI ISO/IEC 27001 mendapatkan pembaruan yaitu SNI ISO/IEC 27001:2022 yang dirilis pada tahun 2022. Sebagai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), SNI ISO/IEC 27001 sangat dinamis mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini diperlukan agar standar keamanan informasi tetap relevan dengan kondisi terkini
Rumus Perhitungan	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di beberapa area Berikut: • Kategori Sistem Elektronik yang digunakan • Tata Kelola Keamanan Informasi • Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi • Kerangka Kerja Keamanan Informasi • Pengelolaan Aset Informasi • Teknologi dan Keamanan Informasi • Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (Cloud Service) dan Perlindungan Data Pribadi.
Interpretasi	Interpretasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) ini melibatkan seluruh unsur komponen pemerintah daerah, yang menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui dukungan infrastruktur TIK berupa firewall dan kemampuan sumber daya manusia secara teknis yang melakukan penanganan terhadap gangguan atau ancaman keamanan siber di sistem pemerintahan berbasis elektronik. hal ini akan mendorong tingkat kematangan keamanan informasi bagi perangkat daerah atau pemerintah di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.
Sumber Data	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Nama Indikator	INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)
Dasar Hukum	• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; • Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; • Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
Definisi	Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugastugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral. Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Nilai indeks pembangunan statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$ Klasifikasi: 1. Kurang (IPS <1,8) 2. Cukup (IPS 1,8 s.d <2,6) 3. Baik (IPS 2,6 s.d < 3,5) 4. Sangat Baik (IPS 3,5 s.d < 4,2) 5. Memuaskan (IPS 4,2 s.d 5,0)
Interpretasi	Nilai IPS yang tinggi menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral dan SDI di suatu entitas (daerah, lembaga, atau kementerian) sudah matang, berkualitas, dan efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa data yang dihasilkan akurat, andal, dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, pengambilan kebijakan, serta evaluasi pembangunan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

2. Tabel Definisi Operasional Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2025-2029

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Jangkauan Dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Proporsi masyarakat sasaran yang mengetahui kebijakan/program prioritas.	Semakin tinggi, komunikasi publik semakin efektif.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	Tersedianya Dokumen Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen peningkatan pengelolaan IKP yang selesai dan sah.	Menunjukkan jumlah dokumen yang dihasilkan.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundangan	Pelayanan Informasi Publik	Permohonan informasi yang diselesaikan sesuai batas dan ketentuan.	Semakin tinggi, layanan informasi semakin tuntas.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Triwulan	
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunitas Publik yang difasilitasi mengikuti Bimtek/Pelatihan	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	ASN komunikasi publik yang mengikuti bimtek/pelatihan terfasilitasi.	Semakin banyak, kapasitas SDM semakin luas.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Triwulan	
	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase Khalayak yang terpapar informasi publik	Diseminasi Informasi	Proporsi khalayak sasaran yang menerima informasi publik.	Semakin tinggi, jangkauan diseminasi semakin luas.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Triwulan	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	<i>Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>	<i>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	<i>Media publik yang dikelola/dimanfaatkan sesuai juknis.</i>	<i>Semakin banyak, kanal komunikasi semakin beragam.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Triwulan</i>	
	<i>Terlaksananya Relasi Media</i>	<i>Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi dewan Pers; 2. Terdaftar di Dinas Kominfo; 3. Aktif dalam kegiatan Relasi Media</i>	<i>Relasi Media</i>	<i>Aktivitas relasi media yang memenuhi seluruh kriteria.</i>	<i>Semakin banyak, hubungan media semakin aktif.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Triwulan</i>	
	<i>Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</i>	<i>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan Informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</i>	<i>Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat</i>	<i>Komunitas terdaftar yang aktif menyebarluaskan informasi.</i>	<i>Semakin banyak, jejaring diseminasi semakin luas.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Triwulan</i>	
	<i>Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah</i>	<i>Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik</i>	<i>Rekomendasi komunikasi atas isu dan agenda prioritas.</i>	<i>Semakin banyak, respons komunikasi semakin memadai.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Triwulan</i>	
	<i>Terlaksananya Penyusunan Konten</i>	<i>Jumlah Konten Informasi Publik</i>	<i>Penyusunan Konten</i>	<i>Konten informasi publik yang diproduksi dan dipublikasikan.</i>	<i>Semakin banyak, ketersediaan konten meningkat.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Triwulan</i>	
	<i>Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik</i>	<i>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun</i>	<i>Penyusunan Strategi Komunikasi Publik</i>	<i>Strategi komunikasi publik yang selesai disusun.</i>	<i>Menunjukkan jumlah strategi yang tersedia.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Semesteran</i>	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</i>	<i>Jumlah Laporan Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang Akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika</i>	<i>Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</i>	<i>Laporan dukungan Komisi Informasi yang akuntabel dan disampaikan.</i>	<i>Menunjukkan pemenuhan dukungan dan pelaporan KI.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Triwulan</i>	
	<i>Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</i>	<i>Persentase Khalayak Sasaran yang terpapar Informasi terkait Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</i>	<i>Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</i>	<i>Proporsi sasaran yang menerima informasi peraturan IKP.</i>	<i>Semakin tinggi, pemahaman regulasi semakin luas.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
		Domain Layanan SPBE (Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital)		Skor kematangan layanan SPBE hasil evaluasi.	Skor lebih tinggi berarti layanan lebih matang.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Peningkatan Implementasi Inovasi Provinsi Cerdas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kenaikan capaian implementasi inovasi Provinsi Cerdas.	Nilai positif berarti implementasi membaik.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	Tersedianya Laporan Peningkatan efektivitas implementasi inovasi Provinsi Cerdas serta optimalisasi koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Implementasi inovasi Provinsi Cerdas serta optimalisasi koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan peningkatan inovasi dan integrasi portal yang selesai.	Menunjukkan jumlah laporan peningkatan yang tersedia.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi</i>	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas</i>	<i>Laporan koordinasi dan fasilitasi Provinsi Cerdas.</i>	<i>Menunjukkan pelaksanaan yang terdokumentasi.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik</i>	<i>Tahunan</i>	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<i>penyelenggaraan Provinsi Cerdas</i>				<i>Provinsi Sulawesi Tengah</i>		
	<i>Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi</i>	<i>Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional</i>	<i>Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi</i>	<i>Layanan Pemda yang menggunakan portal terintegrasi.</i>	<i>Semakin banyak, integrasi layanan semakin luas.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
		Domain Manajemen SPBE (Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital)		Skor kematangan manajemen SPBE hasil evaluasi.	Skor lebih tinggi berarti manajemen lebih matang.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Nilai Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Di Pemerintah Provinsi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Skor kematangan proses pembangunan aplikasi SPBE.	Skor lebih tinggi berarti pembangunan lebih tertata.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	Tersedianya Laporan Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Evaluasi Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Provinsi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan koordinasi dan evaluasi pembangunan aplikasi SPBE.	Menunjukkan jumlah evaluasi yang terdokumenta si.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD dalam rangka penyelenggaraan SPBE</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas</i>	<i>Penyediaan Akses Internet</i>	<i>Perangkat Daerah/UPTD pengguna internet yang disediakan Dinas.</i>	<i>Semakin banyak, cakupan konektivitas semakin luas.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Triwulan</i>	
	<i>Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai</i>	<i>Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo</i>	<i>Dokumen fasilitasi audit TIK yang selesai.</i>	<i>Menunjukkan jumlah fasilitasi audit yang dilakukan.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi</i>	<i>Tahunan</i>	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<i>kewenangan Dinas Kominfo</i>				<i>Sulawesi Tengah</i>		
	<i>Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional</i>	<i>Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional</i>	<i>Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional</i>	<i>Aplikasi SPBE yang ditempatkan pada Pusat Data Nasional.</i>	<i>Semakin banyak, pemanfaatan PDN semakin tinggi.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Triwulan</i>	
	<i>Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah</i>	<i>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali</i>	<i>Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah</i>	<i>Laporan operasional pusat kendali yang selesai.</i>	<i>Menunjukkan keberlangsungan operasi pusat kendali.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
	Tersedianya Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan peningkatan pengelolaan domain/subdomain yang selesai.	Menunjukkan jumlah laporan pengelolaan yang tersedia.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah)</i>	<i>Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	<i>Dokumen pengelolaan domain/subdomain yang selesai.</i>	<i>Menunjukkan jumlah dokumen administrasi domain.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
		Domain Kebijakan Internal SPBE (Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital)		Skor kematangan kebijakan internal SPBE.	Skor lebih tinggi berarti kebijakan lebih matang.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Nilai Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Skor kematangan layanan jaringan intra pemerintah.	Skor lebih tinggi berarti jaringan lebih matang.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tersedianya Laporan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE.	Menunjukkan jumlah koordinasi yang terdokumenta si.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah</i>	<i>Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, serta Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah</i>	<i>Dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang selesai.</i>	<i>Semakin lengkap, tata kelola semakin kuat.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
		Domain Tata Kelola SPBE (Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital)		Skor kematangan tata kelola SPBE.	Skor lebih tinggi berarti tata kelola lebih matang.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Nilai Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Skor kematangan layanan jaringan intra pemerintah.	Skor lebih tinggi berarti jaringan lebih matang.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	Tersedianya Laporan Peningkatan Evaluasi Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Evaluasi Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan evaluasi kematangan jaringan intra yang selesai.	Menunjukkan jumlah evaluasi yang terdokumenta si.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Kabupaten/kota yang terhubung ke jaringan intra provinsi.</i>	<i>Semakin banyak, konektivitas antarpemerintah semakin luas.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Perangkat Daerah provinsi yang terhubung jaringan intra.</i>	<i>Semakin banyak, cakupan jaringan internal meningkat.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE</i>	<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE</i>	<i>Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah, serta Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE</i>	<i>Aplikasi khusus yang dibangun/dikembangkan sesuai standar SPBE.</i>	<i>Semakin banyak, kebutuhan aplikasi semakin terpenuhi.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Nilai Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Skor kematangan penggunaan SPLP.	Skor lebih tinggi berarti interoperabilitas lebih matang.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	Tersedianya Laporan Peningkatan Evaluasi Kematangan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kematangan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan evaluasi kematangan SPLP yang selesai.	Menunjukkan jumlah evaluasi yang terdokumentasi.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Terlaksananya penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah</i>	<i>Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>	<i>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka Interopabilitas Data dan Integrasi Layanan</i>	<i>Aplikasi SPBE yang terintegrasi melalui SPLP.</i>	<i>Semakin banyak, interoperabilitas aplikasi meningkat.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
		Indeks Keamanan Informasi (Kami)		Skor kesiapan keamanan informasi berdasarkan Indeks KAMI.	Skor lebih tinggi berarti keamanan lebih siap.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Keamanan Siber Dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Proporsi capaian kematangan keamanan siber dan sandi.	Semakin tinggi, kematangan keamanan semakin baik.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	Tersedianya Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Laporan peningkatan pola hubungan komunikasi sandi.	Menunjukkan jumlah laporan penguatan pola komunikasi.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi</i>	<i>Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</i>	<i>Perangkat Daerah yang terhubung jaring komunikasi sandi.</i>	<i>Semakin banyak, cakupan komunikasi aman meningkat.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Triwulan</i>	
Meningkatnya Keamanan Siber Dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber Dan Sandi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Proporsi capaian kematangan keamanan siber dan sandi.	Semakin tinggi, kematangan keamanan semakin baik.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	Tersedianya Laporan Peningkatan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan peningkatan keamanan siber dan sandi.	Menunjukkan jumlah laporan peningkatan yang tersedia.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	<i>Laporan pelaksanaan keamanan informasi elektronik/non-elektronik.</i>	<i>Menunjukkan pelaksanaan yang terdokumentasi.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
	<i>Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan</i>	<i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</i>	<i>Perangkat Daerah pengguna layanan keamanan dan persandian.</i>	<i>Semakin banyak, pemanfaatan layanan</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi</i>	<i>Tahunan</i>	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<i>Informasi dan Persandian</i>			<i>keamanan meningkat.</i>	<i>Sulawesi Tengah</i>		
	<i>Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan</i>	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan</i>	<i>Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan</i>	<i>Laporan pengelolaan sumber daya berbasis analisis kebutuhan.</i>	<i>Menunjukkan pengelolaan sumber daya yang terdokumentasi.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
	<i>Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai Panduan dalam menjalankan Penyelenggaraan Persandian</i>	<i>Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</i>	<i>Kebijakan keamanan/persandian yang ditetapkan dan berlaku.</i>	<i>Semakin banyak, landasan tata kelola semakin lengkap.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		Skor hasil penilaian pembangunan statistik sektoral.	Skor lebih tinggi berarti statistik semakin baik.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, Dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Proporsi OPD yang memakai data statistik dalam perencanaan.	Semakin tinggi, perencanaan semakin berbasis data.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tersedianya Laporan Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Laporan peningkatan pemanfaatan data untuk perencanaan.	Menunjukkan jumlah laporan pemanfaatan data.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar</i>	<i>Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral</i>	<i>Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar</i>	<i>Proporsi kegiatan statistik dengan dokumen perencanaan lengkap.</i>	<i>Semakin tinggi, proses statistik semakin tertib.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional</i>	<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik</i>	<i>Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional</i>	<i>Proporsi kegiatan statistik yang mendapat rekomendasi pembina.</i>	<i>Semakin tinggi, kepatuhan statistik semakin baik.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik melalui Forum Satu Data Daerah</i>	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah</i>	<i>Koordinasi dan Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral</i>	<i>Laporan pelaksanaan Forum Satu Data Daerah.</i>	<i>Menunjukkan jumlah forum yang terdokumentasi.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, Dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Proporsi OPD yang memakai data statistik dalam evaluasi.	Semakin tinggi, evaluasi semakin berbasis data.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	Tersedianya Laporan Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Laporan peningkatan pemanfaatan data untuk evaluasi.	Menunjukkan jumlah laporan pemanfaatan data.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia</i>	<i>Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, Interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk</i>	<i>Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia</i>	<i>Proporsi kegiatan statistik yang memenuhi prinsip SDI.</i>	<i>Semakin tinggi, standarisasi data semakin baik.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
	<i>Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar</i>	<i>Persentase Kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data</i>	<i>Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral</i>	<i>Proporsi hasil statistik yang dapat diakses pengguna.</i>	<i>Semakin tinggi, keterbukaan data semakin baik.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
	<i>Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</i>	<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</i>	<i>Pegawai yang mengikuti pelatihan bidang statistik.</i>	<i>Semakin banyak, kapasitas statistik meningkat.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
		Domain Layanan SPBE (Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital)		Skor kematangan layanan SPBE hasil evaluasi.	Skor lebih tinggi berarti layanan lebih matang.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Diskominfoantik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfoantik.	Skor lebih tinggi berarti birokrasi semakin baik.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	Tersedianya Laporan Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan peningkatan akuntabilitas kinerja yang selesai.	Menunjukkan jumlah laporan peningkatan akuntabilitas.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP, Manajemen Resiko, SPIP, LPPD, LKJIP, dll</i>	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Laporan evaluasi kinerja dan tindak lanjut yang selesai.</i>	<i>Menunjukkan cakupan evaluasi kinerja perangkat daerah.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Dokumen perencanaan perangkat daerah yang selesai dan sah.</i>	<i>Menunjukkan kelengkapan dokumen perencanaan.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
	<i>Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Elemen Data dalam SIPD e-Walidata)</i>	<i>Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Elemen data sektoral yang dikumpulkan dan diperiksa.</i>	<i>Semakin banyak, pemenuhan data e-Walidata meningkat.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
	<i>Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung.</i>	<i>Menunjukkan pelaksanaan fungsi walidata pendukung.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan peningkatan administrasi keuangan yang selesai.	Menunjukkan jumlah laporan peningkatan keuangan.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Laporan keuangan akhir tahun dan koordinasinya.</i>	<i>Menunjukkan pemenuhan pelaporan keuangan tahunan.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>ASN yang menerima gaji dan tunjangan.</i>	<i>Menunjukkan jumlah</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian</i>	<i>Tahunan</i>	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>penerima hak keuangan.</i>	<i>dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>		
	<i>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN.</i>	<i>Menunjukkan dukungan administrasi tugas ASN.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan.</i>	<i>Menunjukkan jumlah proses keuangan terdokumentasi.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	<i>Dokumen tanggapan dan tindak lanjut pemeriksaan.</i>	<i>Menunjukkan pemenuhan respons hasil pemeriksaan.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan peningkatan pengelolaan barang milik daerah.	Menunjukkan jumlah laporan peningkatan BMD.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Laporan rekonsiliasi dan penyusunan BMD.</i>	<i>Menunjukkan pemenuhan rekonsiliasi dan pelaporan BMD.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Laporan penatausahaan barang milik daerah.</i>	<i>Menunjukkan tertib administrasi BMD.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah.</i>	<i>Menunjukkan kebutuhan BMD yang telah direncanakan.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan peningkatan administrasi kepegawaian.	Menunjukkan jumlah laporan peningkatan kepegawaian.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Paket pakaian dinas dan atribut yang disediakan.</i>	<i>Menunjukkan realisasi penyediaan pakaian dinas.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	<i>Dokumen koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian.</i>	<i>Menunjukkan pelaksanaan sistem kepegawaian terdokumentasi.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai.</i>	<i>Menunjukkan cakupan penilaian kinerja pegawai.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas.</i>	<i>Semakin banyak, kompetensi pegawai meningkat.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan.</i>	<i>Semakin banyak, pemahaman regulasi meningkat.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi</i>	Tahunan	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<i>Sulawesi Tengah</i>		
	<i>Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.</i>	<i>Menunjukkan administrasi kepegawaian terdokumentasi.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan peningkatan administrasi umum yang selesai.	Menunjukkan jumlah laporan peningkatan administrasi.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang selesai.</i>	<i>Menunjukkan jumlah rapat yang terdokumentasi.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD.</i>	<i>Menunjukkan dukungan SPBE yang terdokumentasi.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Paket komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia.</i>	<i>Menunjukkan realisasi penyediaan komponen.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia.</i>	<i>Menunjukkan realisasi penyediaan perlengkapan.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia.</i>	<i>Menunjukkan realisasi kebutuhan cetak.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Dokumen penatausahaan arsip dinamis.</i>	<i>Menunjukkan tertib pengelolaan arsip dinamis.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan peningkatan kualitas pengadaan BMD.	Menunjukkan jumlah laporan peningkatan pengadaan.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Kendaraan dinas perorangan/jabatan yang disediakan.</i>	<i>Menunjukkan realisasi pengadaan kendaraan.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan.</i>	<i>Menunjukkan realisasi pengadaan kendaraan.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Tersedianya Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Paket mebel yang disediakan.</i>	<i>Menunjukkan realisasi pengadaan mebel.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Unit peralatan dan mesin lain yang disediakan.</i>	<i>Menunjukkan realisasi pengadaan peralatan.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi</i>	Tahunan	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<i>Sulawesi Tengah</i>		
	<i>Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Unit gedung/bangunan yang disediakan.</i>	<i>Menunjukkan realisasi pengadaan bangunan.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Unit sarana/prasarana gedung yang disediakan.</i>	<i>Menunjukkan realisasi pengadaan sarana.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	Tersedianya Laporan Peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan peningkatan ketersediaan jasa penunjang.	Menunjukkan jumlah laporan penyediaan jasa.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	
	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Laporan penyediaan komunikasi, air, dan listrik.</i>	<i>Menunjukkan pemenuhan layanan utilitas kantor.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.</i>	<i>Menunjukkan pemenuhan pelayanan umum kantor.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	Tahunan	
	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan peningkatan pemeliharaan BMD penunjang.	Menunjukkan jumlah laporan peningkatan pemeliharaan.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI	SUMBER DATA	FREKUENSI	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.</i>	<i>Menunjukkan cakupan pemeliharaan kendaraan.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Peralatan dan mesin yang dipelihara.</i>	<i>Menunjukkan cakupan pemeliharaan peralatan.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Sarana/prasarana gedung yang dipelihara/direhabilitasi.</i>	<i>Menunjukkan cakupan pemeliharaan sarana.</i>	<i>Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>Tahunan</i>	